

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PERANAN
KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

6

Oleh: Rahmawati Halim

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dan peranan pimpinan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 93 orang. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan metode sampling jenuh sehingga jumlah sampel penelitian ditetapkan berjumlah 93 orang. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi ganda dengan persamaan regresi $\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persamaan regresi diperoleh yaitu $\hat{Y} = 8,444 + 0,116 + 0,343$. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, dalam mencapai pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) khususnya yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah menjadi isu sentral yang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kebebasan politik telah mendorong media massa dengan bebas

membeberkan berbagai kasus dan peristiwa yang menyangkut keuangan pemerintah yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh mata dan telinga publik.

Liputan media saat ini telah menumbuhkan kesadaran warga akan hak-haknya mereka terhadap anggaran pemerintah, khususnya yang terkait dengan anggaran yang dikendalikan oleh pemerintah daerah dan dampaknya bagi kehidupan dan kesejahteraan warga masyarakat. Kesadaran warga masyarakat tersebut menuntut adanya sentuhan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meningat dalam iklim demokrasi sekarang ini transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah menjadi amat penting bahkan merupakan hak asasi manusia. Menurut Stiglitz (dalam Bratakusuma, 2003:9) menyatakan bahwa transparansi adalah merupakan hak dasar untuk mengetahui informasi tentang apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah dan mengapa program itu dipilih dan dibiayai. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan berpihak pada orang miskin (*pro poor*), mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Di samping itu, dengan ditingkatkan pengelolaan keuangan yang menganut sistem transparansi dan akuntabilitas keuangan maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Dalam upaya reformasi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik, maka Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara/daerah. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah diterbitkannya dua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu diterbitkan pula Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencoba lebih jauh mendahului proses penganggaran dengan proses perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yang terpenting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah adanya prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi prinsip: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mulai dari penjelasan prinsip, fungsi keuangan daerah, kewenangan dan fungsi keuangan, penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Belum genap satu tahun berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kemudian Departemen Dalam Negeri kembali mengeluarkan revisinya menjad Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Tidak heran revisi ini diberlakukan karena sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diimplementasikan, ia mendapat kritik dari berbagai daerah, meskipun Permendagri revisi ini juga tidak bebas dari kritikan. Salah satu pasal tambahan yang terkait dengan perlunya asas transparansi adalah pasal 116 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang berbunyi: “Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam lembaran daerah”. Anthony dan Govindrajan (2005:7) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer/pimpinan pada setiap level organisasi. Penyusunan anggaran secara partisipasi diharapkan kinerja manajer akan meningkat, ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka pegawai dan pimpinan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan

anggaran. Sukses tidaknya seorang karyawan dalam bekerja akan dapat diketahui apabila perusahaan atau organisasi yang bersangkutan menerapkan sistem penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Manullang, 2009:69). Selain faktor manajer (pimpinan), pengelolaan keuangan daerah yang berhasil dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan organisasi. Faktor yang berhubungan dengan pegawai adalah komitmen organisasi dalam diri pegawai untuk melaksanakan tugas pokok yang dibebankan.

Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum, Luthans dalam Manullang (2009:69) mengartikan komitmen organisasional sebagai sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Oleh karena itu, komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Hal ini disebabkan karena antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya. Sedangkan faktor lingkungan organisasi adalah peran pimpinan dalam mengelola seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi nilai ekonomis (*value for money*) serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: “ Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan dalam Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Pada Dinas PPKA Kabupaten Banggai Kepulauan?”

TINJAUAN PUSTAKA

1) Komitmen Organisasi

Robbins (2006:80-81) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*. Definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Robbins ini memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) *belief* yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Selanjutnya Robbins (2006:80-81) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau *organization*. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker dalam Indrawidjaya (2000:67) yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (*need to*) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain.

Menurut Greenberg dan Baron dalam Anthony dan Govindrajan (2005:71) karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi organisasi. Komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi organisasi. Di sisi lain,

komitmen organisasi yang tinggi memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat absensi dan tingkat *turnover* dan juga dengan tingkat kelambanan dalam bekerja (Greenberg & Baron, 1993 dalam Ranupandojo, 2000:142).

Tiga sikap karyawan/pegawai yaitu: (1) Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. (2) Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan. (3) Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Komitmen organisasi dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1990) dalam Indrawidjaya (2000:67) ada tiga komponen organisasi yaitu: komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen kontinuans (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Hal yang umum dari ketiga komponen komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu dengan organisasi dan mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi. Definisi dan penjelasan dari setiap komponen komitmen organisasi adalah sebagai berikut : (1) Komitmen afektif mengarah pada *the employee's emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization*. Hal ini berarti, komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (*want to*) melakukan hal tersebut. (2) Komitmen kontinuans berkaitan dengan *an awareness of the costs associated with leaving the sumber daya yang ada*.

2) Peranan Pimpinan

Dalam perspektif administrasi, pimpinan atau manajer merupakan orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau unit yang dipimpinya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Mitzberg dalam Herminingsih, 2009). Mitzberg menjelaskan bahwa manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan antara lain: (1) Peran

interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan peran sebagai *forehead*, *leader*, dan *liaison* (penghubung). (2) Peran informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai *spokesperson*. (3) Peran penagambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai *entrepreneur* (*entrepreneur*), *disturbance handle* (*penangkal masalah*), *resources allocator* (*pengalokasi sumber daya*) dan *negotiator* (*negosiator*). Deskripsi peran manajer yang dikemukakan di atas, akan membutuhkan sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja seajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang ada.

3) Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam bidang administrasi atau manajemen banyak ditemui istilah “pengelolaan” sering disamakan artinya dengan manajemen (Siagian, S.P, 2007:49). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:534) memiliki arti: mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dsb); mengurus (perusahaan, proyek, dsb); menjalankan.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi nilai ekonomis (*value for money*) serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas

pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.

4) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana perimbangan, terdiri dari:
 - 1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
 - 2) Dana alokasi umum
 - 3) Dana alokasi khusus
 - 4) Pinjaman daerah
 - 5) Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya. Secara garis besar kebijaksanaan mencakup beberapa komponen utama yaitu:

1. Kebijakan di bidang penerimaan, yaitu untuk mendorong kemampuan daerah yang semaksimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri.
2. Kebijakan di bidang pengeluaran berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan Negara dan proyek daerah serta pelaksanaannya.

Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk kemampuan personil dan struktur organisasinya. Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari: (a) Hasil pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah. (b) Hasil retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat. (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. (d). Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan:

- 1) Jasa giro
- 2) Pendapatan bunga
- 3) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 4) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dibutuhkan kemampuan yang memadai dari pejabat atau staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. Menurut Ismail Munawar (2002:34) bahwa PAD merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD, sebagai media penggerak program pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan sampel jenuh. Teknik analisa data menggunakan regresi ganda dengan Formula:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

\hat{Y} = variabel terikat yang diprediksi

a = nilai konstanta (nilai tetap apabila tidak ada nilai interferen)

b_1X_1 = nilai variabel independen (prediktor) X_1

b_2X_2 = nilai variabel independen (prediktor) X_2

sejumlah uji statistik; (1) Uji reliabilitas data menggunakan *Cronbach Alpha* > 0.6 (2) Uji Normalitas Data menggunakan *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal untuk dengan menggunakan Analisis Hotelling's T-Squared dengan bantuan program SPSS versi 16,0

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan memberikan gambaran bahwa komitmen organisasi dan peranan pimpinan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Banggai Kepulauan. Jika dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas komitmen organisasi X1 dan peranan pimpinan X2 memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap variabel terikat pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persamaan regresi ganda diperoleh: $\hat{Y}=8,444+0,116x_1+ 0,343x_2$. Persamaan regresi ganda tersebut di atas memberikan informasi bahwa variabel bebas X1 dan X2 berpengaruh secara positif terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah. Dengan melihat persamaan Regresi ganda diketahui bahwa meskipun tidak ada pengaruh variabel bebas X1 dan X2 ternyata nilai konstanta pengelolaan keuangan daerah sebesar 8,444. Selanjutnya untuk nilai komitmen organisasi sebesar 0,116 dapat diprediksikan bahwa jika variabel komitmen organisasi dinaikkan satu satuan maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,116. Begitu pula untuk variabel peranan pimpinan (X2) diperoleh nilai variabel sebesar 0,343 berarti nilai peranan pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,343. Jika variabel ini dinaikkan satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan 0,343 terhadap variabel terikat pengelolaan keuangan daerah (Y).

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas jika salah satu variabel bebas dikontrol dapat dilihat pada hasil analisis korelasi parsial ternyata diperoleh sumbangan efektif variabel bebas komitmen organisasi terhadap variabel terikat

pengelolaan keuangan daerah adalah 0,125 atau ada sekitar 12,5%. Sementara jika variabel komitmen organisasi dikontrol, maka diperoleh koefisien determinasi pengaruh variabel peranan pimpinan terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,301 atau 30,1%.

Dengan demikian maka variabel bebas baik secara bersama-sama atau parsial memiliki pengaruh terhadap variabel komitmen organisasi dinaikkan satu satuan maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,116. Begitu pula untuk variabel peranan pimpinan (X_2) diperoleh nilai variabel sebesar 0,343 berarti nilai peranan pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,343. Jika variabel ini dinaikkan satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan 0,343 terhadap variabel terikat pengelolaan keuangan daerah (Y).

Dilihat dari koefisien determinasi (R) memberikan informasi bahwa variabel bebas (X_1, X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 31,9%, sementara masih ada 68,1% ditentukan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan informasi kepada penentu kebijakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan komitmen organisasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, di samping itu perlunya peningkatan peran pimpinan dalam mengelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang patut menjadi perhatian adalah sejauhmana komitmen organisasi yang ditunjukkan oleh sikap, perilaku, dan persepsi pegawai pada Dinas PPKA dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagai pemerintah daerah, dan pembiayaan. Penatausahaan ini dilakukan pada Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran. Penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki hubungan erat dengan proses penataan kelembagaan pada satuan kerja tersebut. Para ahli mendefinisikan penataan kelembagaan memiliki hubungan yang erat dengan perilaku organisasi itu sendiri. Yayat Hayati (2002:9)

mengemukakan bahwa penataan kelembagaan adalah kegiatan organisasi dalam membagi-bagi tugas organisasi ke dalam group/divisi kerja atau departemen, kemudian mengkoordinasikan group-group terpisah tersebut dengan tujuan untuk mencapai efektivitas organisasi secara keseluruhan. Sasaran kegiatan tersebut merupakan bagian dari konsep organisasi secara umum yang mencakup strategi atau sasaran pengambilan keputusan dan mekanisme pengintegrasian setiap anggota ke dalam organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil analisis data penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi ganda diperoleh bahwa variabel bebas (X1) komitmen organisasi dan peranan pimpinan (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan dengan persamaan regresi adalah $\hat{Y}=8,444+0,116_{X1}+ 0,343_{X2}$.
2. Hasil perhitungan analisis regresi ganda diperoleh koefisien determinasi dengan (R^2) sebesar 31,9%, sementara masih ada 68,1% ditentukan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Hasil analisis korelasi parsial diperoleh informasi bahwa variabel komitmen organisasi memiliki kontribusi positif sebesar 11,6% terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan variabel peranan pimpinan juga berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 34%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan agar lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan komitmen organisasi dan peranan pimpinan dalam mengelola keuangan daerah.
2. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih mengefektifkan peranan pimpinan dan mengembangkan

komitmen organisasional para pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan disarankan agar perlu melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) pengelolaan keuangan agar menghasilkan sumber daya aparatur yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N. dan V. Govindrajan 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Aidinil,Zetra, 2006. *Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, UI Press.
- Basry,Faisal.2002. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bratakusuma Sholikin, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah*, Surabaya.
- Djatmiko, Yayat, 2005. *Perilaku Organisasi*, Edisi Revisi, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hoessein, Bhenyamin, 2002. *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.